

**STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA**

TUGAS AKHIR



**Oleh
LARAS RUSDI
BP/NIM : 2016/16233053**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

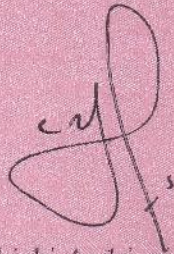
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Laras Rusdi
TM/NIM : 2016/16233053
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

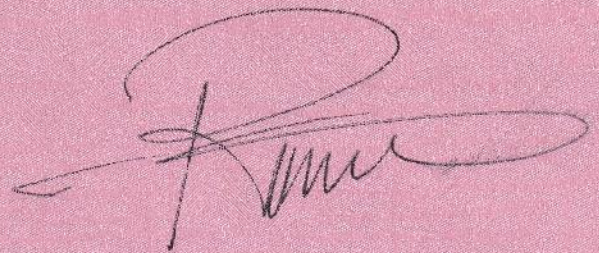
Padang, 01 November 2019

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Rosyeni Rasyid, S.E, M.E
NIP. 19610214 198912 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Laras Rusdi
NIM/BP : 16233053/2016
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

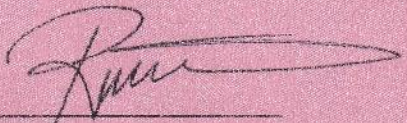
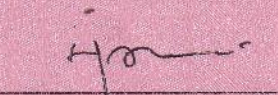
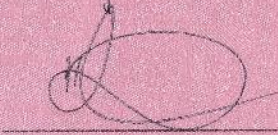
Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rosyeni Raszyd , SE, M.F (Ketua)	
2. Abel Tasman, SE, MM (Anggota)	
3. Desi Susanti , S.Pd, M.Pd (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Rusdi
Tahun Masuk/NIM : 2016/16233053
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/21 Oktober 1998
Keahlian :
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Gunung Ledang No. 28 Padang
Judul Tugas Akhir :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 01 November 2019

Saya yang menyatakan,



Laras Rusdi
NIM. 16233053

ABSTRAK

Laras Rusdi/16233053

:Strategi dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Strategi dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan informasi yang diperoleh selama penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa data realisasi dan target pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari tahun 2016-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua mengalami pencapaian target yang berbeda dan realisasi yang kurang maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu strategi dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yaitu dilakukan dengan berbagai macam strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut. Salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempermudah bagi wajib pajak untuk melakukan forum tanya jawab ataupun mendapatkan informasi secara langsung melalui website resmi DJP. Bagi wajib pajak yang terlambat atau sudah lewat jatuh tempo dalam pembayaran maka diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) atau sanksi lainnya. Dengan melakukan hal tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Dua juga bisa memberikan efek jera kepada wajib pajak tersebut. Artinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua telah mampu melakukan Manajemen Pajak terutama dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kata Kunci : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillahirabbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-nya serta kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Strategi Dalam Meningkatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua”**

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir untuk memperoleh gelar Alhi Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini dengan setulusnya yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Dr. Idris, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4. Ibu Rosyeni Rasyid, SE, M.E sebagai Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu dengan ikhlas dan tulus memberikan bimbingan akademik dalam Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

5. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini
6. Bapak dan Ibu Staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini, serta kepada seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi
7. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menemukan sumber referensi
8. Karyawan dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang telah berkenan dan bersedia untuk memberikan waktu dan informasi yang diperlukan penulis selama penelitian Tugas akhir ini
9. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda tercinta Rusdi, Am.d dan Ibunda tercinta Erlinda beserta ketiga saudara kandung saya yang telah banyak memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
10. Dan juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan khususnya teman SMA dan juga angkatan 2016 yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan-masukan demi terwujudnya impian penulis

Penulis merasa bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Program studi DIII Manajemen Perpajakan.

Padang, November 2019

Laras Rusdi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pajak Secara Umum	7
1. Defenisi Pajak.....	7
2.Ciri-Ciri Pajak	8
3. Fungsi Pajak	9
4. Hak dan Kewajiban Pajak.....	9
B. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	13
1. Defenisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	13
2. Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	13
3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	15

4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	15
5. Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	16
6. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	17
7. Sanksi Terlambat atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
C. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	19
1. Defenisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	19
2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	19
3. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	20
4. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	21
D. Strategik	22
E. Manajemen Strategik	23
F. Strategi Direktorat Jenderal Pajak	25
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Bentuk Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Rancangan Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Tahapan Penelitian	37
3. Objek Penelitian	38
4. Sumber Data	39
5. Teknik Analisis.....	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Instansi KPP Padang Dua	40
B. Struktur Organisasi KPP Padang Dua	47
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi SPT Tahunan	4
Tabel 1.2 Struktur Organisasi KPP Padang Dua.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fotocopy Surat Observasi

Lampiran 2 Fotocopy Surat Balasan Observasi

Lampiran 3 Fotocopy Surat Balasan Nota Dinas Observasi

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 Foto dengan Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak, Wajib Pajak merupakan salah satu yang wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan menurut UU sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana dan memicu realisasi penerimaan pajak agar dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) yang dimiliki. Jenis pajak yang menjadi sumber Penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan lain sebagainya. Serta yang menjadi subjek pajak adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan atau melaporkan serta pembayaran penghasilan, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Sehingga akhirnya atas tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak untuk Negara akan berkurang. Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak membayar pajak merupakan posisi strategi dalam peningkatan penerimaan pajak.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak, ini merupakan wujud pengabdian sebagai

warga negara. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran yang besar untuk keadaan tersebut untuk dapat dijadikan indikasi bahwa warga negara bisa memberikan dukungan fiskal kepada kebijakan pemerintah secara sukarela. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas negara, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan infrastruktur dan pariwisata. Dan dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat ini dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi juga merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan, salah satunya yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua karena tidak dipungkiri bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut. Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua sebagai objek Tugas Akhir dimana Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk negara, untuk meningkatkan potensi dalam penerimaan Pajak dan mewujudkan bangunan atau bentuk fisik yang lain.

Pemerintah juga fokus berupaya dalam memacu perekonomian dengan peningkatan infrastruktur dan pariwisata di Sumatera Barat agar penerimaan pajak

terus meningkat. Diantaranya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, menurut sumber Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar tidak memenuhi kewajiban subjektif (Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah PTKP) sehingga menjadi beban administratif dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Berikut target dan realisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua tahun 2016-2018:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi wajib pajak yang melapokan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Persentase Pencapaian (%)	Persentase Tidak Tercapai (%)
2016	57,161	37,567	65,72%	34,27%
2017	33,440	32,414	96,93%	3,06%
2018	49,502	35,846	72,41%	27,58%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, 2019 (Data diolah)

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar SPT Tahunan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Padang Dua dari tahun 2016 sampai dengan 2018 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Seperti yang dilihat bahwa target setiap tahunnya tidak stabil dan realisasinya pun mengalami naik turun. Melihat fenomena yang terjadi pelaporan SPT tahunan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih kurangnya strategi dan upaya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua untuk meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memilih judul: **“Strategi Dalam Meningkatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam yaitu: Bagaimana Strategi dalam Meningkatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?

C. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui yaitu: Bagaimana Strategi dalam Meningkatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh hal yang berguna baik bagi penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana strategi dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, sebagai studi perbandingan antara teori dan praktik yang telah di dapat pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan, serta sebagai masukan dan langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Negeri Padang yang ingin mendalami masalah pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pembahasan tentang Strategi dalam Meningkatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, maka kesimpulannya yaitu:

1. Realisasi wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih belum mencapai target yaitu pada tahun 2016 sekitar 34,27% pada tahun 2017 sekitar 3,06% dan pada tahun 2018 sekitar 27,58% dan dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak atau pelaporan SPT Tahunan masih kurang maksimal, ini terjadi karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar tidak memenuhi kewajiban subjektif sehingga menjadi beban administratif dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Dua agar target yang ditetapkan tercapai secara maksimal adalah dengan lebih meningkatkan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak baru atau wajib pajak yang tidak mengerti cara pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak. Wajib pajak juga lebih diberi pengawasan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) bagi wajib pajak yang telat ataupun lupa melaporkan pajaknya. Dengan membuka kelas pajak melalui sosialisasi tentang aplikasi terbaru pelaporan SPT Tahunan. Melakukan

berbagai cara seperti mempermudah bagi wajib pajak dengan adanya website DJP untuk forum tanya jawab untuk berbagai informasi, bagaimana cara pelaporan dan lain sebagainya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka sebagai bahan masukan dan pertimbangan karna strategi dalam meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (Tahunan) sangat dibutuhkan di masa mendatang agar diperoleh hasil yang optimal.

Maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua
 - a. Ditjen pajak perlu menargetkan ulang dengan berbagai pertimbangan agar dalam realisasinya ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - b. Dalam meningkatkan strategi melalui pengetahuan serta kesadaran dari wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ini, ditjen pajak harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi terhadap wajib pajak secara menyeluruh misalnya melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan utama.
 - c. Meningkatkan kejelasan informasi terhadap wajib pajak tentang pengertian dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Untuk wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya agar tidak dikenakan sanksi-sanksi yang kemudian akan memberatkan wajib pajak untuk membayarkan pajak di tahun-tahun berikutnya.
- b. Apabila terdapat kesalahan atau terdapat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak sesuai maka wajib pajak yang bersangkutan diharapkan segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua untuk kemudian diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
- Moleong J, Lexy. 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 26. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi
- AB, Susanto. 2014. *Manajemen Strategik Komprehensif*. Jakarta : Erlangga
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/201905/LAKIN%20DJP%202018.pdf> Diakses tanggal 8 8 Oktober 2019 Pukul 16.30 WIB
- Siti, Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *KUP* dan *Peraturan Menteri Keuangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang *KUP* dan *Tata Cara Perpajakan*.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.